BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia banyak perusahaan yang semakin berkembang dengan begitu persaingan antar perusahaan yang satu dengan yang lainnya semakin ketat, dari hal tersebut dapat berdampak pada perkembangan perekonomian. Dimana seluruh perusahaan, khususnya yang telah *go public* di Indonesia berbondong-bondong untuk meningkatkan kualitas perusahaannya melalui berbagai usaha salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin untuk dapat menarik para investor agar menanamkan modalnya pada perusahaan. Dengan banyaknya peningkatan jumlah perusahaan, khususnya perusahaan yang telah *go public* di Indonesia serta dengan adanya peratusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat. Adapun laporan keuangan berkala yang dimaksud yaitu laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan tengah tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Maka dengan adanya peraturan tersebut dan banyak permintaan dari para pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk melakukan audit.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan Peraturan tersebut, jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi, Sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sanksi tersebut yaitu sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) denda yaitu untuk membayar sejumlah uang tertentu; (c) pembatasan kegiatan usaha; (d) pembekuan kegiatan usaha; (e) pencabutan izin usaha; (f) pembatalan persetujuan; (g) pembatalan pendaftaran; (h) pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau (i) pencabutan izin orang perseorangan. Namun sanksi-sanksi tersebut dapat dikenakan tanpa didahului surat peringatan tertulis dan sanksi berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya serta tata cara pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Penelitian mengenai *audit report lag* sudah banyak dilakukan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri antara lain Arsi (2019), menyatakan independensi komite audit, jumlah anggota komite audit, kompetensi komite audit, jumlah rapat komite audit, masa jabatan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel pemoderasi tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian Dzulkifli & Dewayanto (2022) juga menyatakan rapat komite audit berpengaruh negative terhadap *audit report lag*, sedangkan dewan komisaris independen, keahlian komite audit, ukuran komite audit dan rapat dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun dalam penelitian Tanujaya & Reny (2022),

UNMAS DENPASAR

menyatakan ukuran perusahaan, masa jabatan komite audit, opini audit dan pendapatan memiliki jalinan bersignifikan positif terhadap *audit report lag*, sedangkan *leverage*, ukuran KAP, kompetensi komite audit, *audit committee overlap*, independensi komite audit, ukuran komite audit dan rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sidhimantra & Astika, (2021), menyatakan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, independensi komite audit berperngaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Meskipun Bapepam telah memperketat peraturan mengenai pelaporan keuangan tahunan, namun masih banyak perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya (Mediantari *et al*., 2017). Beberapa data yang ditemukan berdasarkan penelusuran yang didapat dari lembaga Bursa Efek Indonesia (BEI) didapati bahwa sampai tanggal 30 Juni 2020 masih terdapat 80 emiten yang tidak melaporkan Laporan Tahunan (*annual report*) tahun 2019 dengan tepat pada waktunya, emiten yang belum menerbitkan laporan keuangan diantaranya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA), PT Estika Tata Tiara Tbk. (BEEF), PT Cowell Development Tbk. (COWL), dan PT Hanson International Tbk. (MYRX), lalu terdapat pula 10 emiten yang hingga 29 Juni 2019 belum memberikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 kepada BEI yang sebagian besar perusahaan berasal dari sub-sektor *wholesale (Durable dan Nondurable Goods)* (Gumilar, 2020). Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan Padahal pada pemangku kepentingan terutama investor sangat membutuhkan laporan

UNMAS DENPASAR

keuangan yang tersedia tepat pada waktunya, karena akan meminimalisir asimetri informasi dan tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi (Saragih & Laksito, 2021).

Pembentukkan komite audit dan dewan komisaris merupakan salah satu implementasi dari GCG (*Good Corporate Governance*) yang mulai digalakkan oleh Pemerintah pada tahun 2000, dimana yang melatarbelakangi adalah masih banyak ditemukan kasus-kasus perusahaan yang melakukan manipulasi data keuangannya serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dimana sangat merugikan investor. Serta salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus rekayasa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia tbk tahun buku 2018. Kasus ini juga menyeret akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan yaitu kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (Ananta, 2019). Atas kasus ini Menteri keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin akuntan publik dan kantor akuntan publik selama 12 bulan (Kusuma, 2019). Kasus kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara tidak hanya terjadi pada PT. Garuda Indonesia tbk, tetapi juga terjadi pada PT. Waskita Karya tbk (Aji, 2019). Oleh karena itu keberadaan komite audit dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik atau belum. Komite Audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Serta dengan

UNMAS DENPASAR

adanya pengawasan yang ketat dari komite audit diharapkan dapat menghindari terjadi *audit report lag* tersebut. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan fenomena yang ditemukan, masih banyak ketidakkonsistenan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian mengenai audit report lag masih terus dilakukan dan dikembangkan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dan melihat pentingnya jumlah anggota komite audit, kompetensi komite audit, rapat komite audit, *gender* komite audit dan rangkap jabatan komite audit dalam menentukan rentang waktu *audit report lag*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021". Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena mayoritas perusahaan yang *go public* di BEI merupakan jenis perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai macam industri yang dapat mewakili semua perusahaan, dan pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki peran penting meningkatkan investasi dan ekspor (Kemenperin, 2019), memiliki prospek yang cerah dimasa depan serta banyak diminati investor sehingga dengan demikian saya tertarik meneliti pada perusahaan manufaktur.

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1) Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh pada *audit report*

lag perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

2) Apakah kompetensi komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3) Apakah rapat komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020?
4) Apakah *gender* komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
5) Apakah rangkap jabatan komite audit berpengaruh pada *audit report lag* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit pada *audit report lag.*
2) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi komite audit pada *audit report lag*.
3) Untuk mengetahui pengaruh rapat komite audit pada *audit report lag.*
4) Untuk mengetahui pengaruh *gender* komite audit pada *audit report lag.*
5) Untuk mengetahui pengaruh rangkap jabatan komite audit pada *audit report lag.*

UNMAS DENPASAR

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag* Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan sehingga dapat dijadikan masukan dan tambahan informasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan serta memberikan gambaran dan meningkatkan pemahaman serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang di dapat di perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya, khususnya yang menyangkut tentang *audit report lag* laporan keuangan di PT. Bursa Efek Indonesia.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori dasar yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Teori yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (2019), ini menerangkan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik atau investor (*principal*). Menurut Jensen & Meckling (2019), hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumber daya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan prinsipal.

Teori keagenan juga merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami tata kelola perusahaan (Jensen & Meckling, 2019). Perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak dalam menjalankan usahanya, antara lain dengan direksi/manajemen, pemegang saham pengendalian dan non-pengendalian, kreditor, pemerintah, karyawan, masyarakat. Sumber daya tidak hanya berupa modal finansial tetapi antara

UNMAS DENPASAR

lain juga modal intelektual dan keterampilan, layanan publik/infrastruktur, sumber daya alam.

Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibanding prinsipal. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen disebut dengan *asimetri informasi* (Muna & Haris, 2018). Tanpa pengawasan yang kuat, agen cenderung untuk mengejar kepentingannya sendiri, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dengan tingkat asimetri informasi yang tinggi, tindakan agen tidak dapat dilihat/diamati dengan baik sehingga agen akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan prinsipal.

Berbagai konflik seperti perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen perusahaan) dapat berdampak pada lambannya penyelesaian laporan keuangan. Konflik kepentingan tersebut dapat berdampak pada lambannya penyelesaian laporan keuangan yang dapat memicu terjadinya *audit report lag* sebab terdapat kemungkinan lamanya laporan keuangan diterima oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan (31 Desember). Hadirnya komite audit akan dapat menengahi konflik kepentingan kedua belah pihak, karena komite audit objektif didirikan oleh perusahaan untuk berusaha sebaik mungkin dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Teori keagenan digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka. Dengan adanya komite audit independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang dapat mengakibatkan *audit report lag.* Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja manajemen sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Spance di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling.* Menurut Spence (1973), teori sinyal adalah pengambilan suatu tindakan oleh perusahaan untuk memberi sinyal atau petunjuk bagi pemakai informasi (investor) tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan untuk masa mendatang. Hal ini sejalan dengan Ni'mah & Triani (2021), teori sinyal merupakan teori yang menggambarkan mengenai tindakan perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada para pengguna, karena adanya *asimetris informasi* antara manajemen dengan prinsipal.

Teori sinyal merupakan sebuah landasan dari pengungkapan sukarela sebab perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan sebuah informasi atas laporan keuangan kepada pihak eksternal perusahaan. Pemberian informasi ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga citra perusahaan dimata investor. Informasi yang diberikan akan memberikan

UNMAS DENPASAR

sinyal bagi investor untuk mengambil keputusan sebelum melakukan investasi. Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan tahunan yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.

Teori sinyal digunakan dalam menjelaskan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan yang telah diaudit kepada publik, sehingga dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai informasi yang baik dan bermanfaat atau *good news.* Namun jika semakin lama *audit report lag* akan menyebabkan informasi yang disampaikan kurang bermanfaat dan mengakibatkan pandangan buruk dari investor atau *bad news* (Purnama *et al*., 2017)

2.1.3 *Audit Report Lag*

Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan yang diukur mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai ke tanggal penerbitan laporan auditor. Oleh karena itu, auditor harus mampu mengestimasi waktu penyelesaian audit untuk dapat mempublikasikan secara tepat waktu laporan keuangannya. Selama penyelesaian pekerjaan audit laporan keuangan, auditor membuat dan mengumpulkan jadwal untuk mencatat hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif yang dilaksanakan, serta membuat jurnal penyesuaian yang akan diusulkan kepada klien jika dalam pekerjaan terjadi perbedaan antara jurnal atau kertas kerja yang dibuat klien dengan dokumen transaksi

UNMAS DENPASAR

(Rodiyahsari & Adi, 2021). Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan merupakan suatu konsekuensi yang harus di penuhi dalam publikasi laporan keuangan dan mengartikan bahwa hasil audit memiliki konsekuensi yang besar karena hasil audit juga harus dilaporkan secara tepat waktu. Semakin panjang *audit report lag* maka akan berdampak negatif, karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut akan mengurangi nilai manfaatnya karena tidak lagi relevan bagi para pengguna informasi keuangan tersebut dalam hal di sini adalah investor.

2.1.4 Komite Audit

Menurut Faiz *et al*., (2018) menyatakan bahwa komite audit merupakan lembaga yang membantu dewan komisaris dalam memastikan apakah perusahaan telah menjalankan *corporate governance* dengan baik dan memenuhi kepatuhan, baik peraturan internal maupun ekternal. Terbentuknya Komite Audit pada perusahaan *go public* di Indonesia dimulai sejak Juni tahun 2000 berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke- 315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa.

Ketentuan mengenai komite audit pada perusahaan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

UNMAS DENPASAR

1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan pada RUPS.
2) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Komite audit berperan penting dalam proses pelaporan keuangan, sebagai sebuah *financial monitor*. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang

UNMAS DENPASAR

lingkup penugasan, dan *fee*;

5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik;

9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik;

UNMAS DENPASAR

2.1.5 Jumlah Anggota Komite Audit

Banyaknya komite audit dalam suatu perusahaan publik diatur dalam surat keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite yaitu anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Jumlah komite audit dalam perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini menimbulkan dugaan bahwa semakin banyak

jumlah anggota komite audit, semakin tinggi kualitas laporan keuangan perusahaan yang di laporkan.

Besarnya jumlah anggota komite audit juga dapat mengurangi adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena dengan jumlah yang cukup banyak anggota komite dapat mengurangi adanya kendala dalam perusahaan. Maka dari itu, peran komite audit sangat penting, dan pengungkapan laporan keuangan akan lebih cepat selesai apabila komite audit ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Rihadrjo (2022), yang menyatakan bahwa dalam *Agency Theory* (teori keagenan) menjelaskan tentang keberadaan suatu komite audit merupakan pengawas bagi investor terhadap kinerja manajemen.

2.1.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi komite audit merupakan kompetensi yang dimiliki anggota komite audit dapat diukur dari latar belakang pendidikan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tercantum bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, dimana wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Rihadrjo (2022), yang menyatakan bahwa keahlian komite audit ini berkaitan dengan *Agency Theory* yang dimana setiap anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang cukup baik dan bagus yang akan dipandang dengan baik untuk dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan entitas.

UNMAS DENPASAR

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur persyaratan independensi keanggotaan komite audit salah satu butir menyebutkan bahwa salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, akuntansi, keuangan dan bisnis. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juga mengatur tentang keahlian komite audit, yang tercermin dari peraturan berikut :

a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta berkomunikasi dengan baik.
b) Salah seorang anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Rapat komite audit

Rapat komite audit merupakan alat komunikasi dan koordinasi antar anggota komite audit dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Rapat komite audit juga merupakan aktivitas yang harus dilaksanakan sebagai sarana untuk membahas dan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Sebab komite audit yang aktif dalam

perusahaan dapat dilihat dari frekuensi pertemuan komite audit (Anugrah & Laksito, 2017).

Berdasarkan peraturan OJK Nomor : 55/PJOK.04/2015, komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Dalam rapat komite audit akan membahas masalah manajerial yang dapat menurunkan kesejahteraan prinsipal. Apabila komite audit sering melakukan rapat maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan efektif (Wandrianto *et al*., 2021).

Rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen, senior kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal.

UNMAS DENPASAR

2.1.8 *Gender* komite audit

Gender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. *Gender* juga merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi sikap kerja. Adanya spesialisasi fisik yang menuntut atribut fisik dari jenis kelamin

(laki-laki dan perempuan) menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan sosialnya (Pratiwi & Triyanto, 2021). Perbedaaan juga didasarkan pada isu *gender* dalam memproses informasi dan pembuatan keputusan. Laki-laki pada umumnya dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan semua informasi yang tersedia, dan mereka juga tidak memproses informasi secara menyeluruh, sehingga dikatakan bahwa laki-laki cenderung melakukan pemrosesan informasi secara terbatas.

Sedangkan perempuan dipandang sebagai pemroses informasi lebih detail, yang melakukan proses informasi pada sebagian besar informasi yang ada untuk pembuatan keputusan atau *judgement*. Adanya dominasi *gender* dalam struktur manajerial memungkinkan adanya perbedaan perilaku dalam menyajikan laporan keuangan dan menyikapi kemungkinan timbulnya *audit report lag*. Fakri & Taqwa (2019) menyatakan bahwa perempuan cenderung melakukan tugas lebih baik dibanding laki-laki, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya *audit report lag*. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah *gender* komite audit memengaruhi *audit report lag*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *gender* komite audit terhadap *audit report lag*, yang akan bermanfaat dalam memberikan masukan bagi manajemen dan investor untuk mempertimbangkan keberadaan *gender* perempuan dalam jajaran komite audit guna mempercepat proses penyelesaian audit dan memberikan sumbangsih empiris atas determinan *audit report lag.*

UNMAS DENPASAR

2.1.9 Rangkap Jabatan Komite Audit

Rangkap jabatan merupakan kondisi dimana seseorang memegang dua atau lebih jabatan dalam organisasi atau pemerintahan. Anggota komite dengan *multiple directorship* adalah anggota komite audit yang memiliki lebih dari satu keanggotaan dan atau dengan kata lain memiliki keanggotaan di perusahaan lain (Rawikarani, 2019). Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (PJOK) memperbolehkan direksi dan komisaris merangkap jabatan dengan syarat – syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24 yaitu:

Pasal 6 yang berbunyi :

1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
   c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan

UNMAS DENPASAR

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 24 yang berbunyi :

1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
   a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
   b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4) Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

UNMAS DENPASAR

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Karam (2017), Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris size, keahlian, independensi, *gender*, dan rapat dari proksi karakteristik komite audit yang mempengaruhi *audit report lag*. Variabel yang digunakan yaitu independen berupa size, keahlian, independensi, *gender*, dan rapat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa size komite audit dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan variabel lainnya yaitu *gender*, keahlian, dan rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag.* Penelitian yang dilakukan oleh Karam (2017), ini menggunakan variabel dependen *audit report lag* dan variabel independen size, keahlian, independensi, *gender* dan rapat. Persamaan penelitian Karam (2017), dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas yang sama yaitu gender dan rapat komite audit serta menggunakan variabel terikat yaitu *audit report lag*. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu terletak pada tahun penelitian, penelitian Karam, (2017), menggunakan tahun 2015-2018 dan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2019-2021, objek penelitian yang berbeda.

Penelitian Kusumah & Manurung (2017), dalam penelitianya menggunakan variabel independen: Ukuran Komite Audit, Independensi

Komite Audit, Rapat Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Dewan, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dengan Variabel dependen: *audit report lag.* Alat analisis yang digunakan adalah analisis multiple. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel yang digunakan yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa independensi komite audit, rapat komite audit, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan memiliki berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Dewan komisaris dan KAP Big 4 tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Persamaan penelitian Kusumah & Manurung (2017), dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan variabel terikat yang sama, yaitu *audit report lag*, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu dalam penelitian Kusumah & Manurung (2017), menggunakan perusahaan non keuangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur. Perbedaan juga terletak pada tahun penelitian dalam Kusumah & Manurung (2017), menggunakan tahun penelitian 2014-2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu tahun 2019-2021, serta dalam penelitian Kusumah dan Manurung menggunakan variabel bebas yaitu independensi komite audit, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas, yaitu rangkap jabatan komite audit.

Penelitian Indarti (2018), yang menguji pengaruh opini audit, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap *audit delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa

UNMAS DENPASAR

Efek Indonesia Periode 2012-2015). Dengan variabel bebas menggunakan opini audit, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* serta variabel terikat adalah *audit delay*. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa opini audit, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015. Persamaan penelitian Indarti (2018), dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur serta variabel terikat yang sama, yaitu *audit report lag*, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tahun penelitian, penelitian Indarti (2018), menggunakan tahun penelitian 2012-2015, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2019-2021. Perbedaan juga terletak pada variabel bebas yang digunakan, penelitian Indarti (2018), menggunakan variabel bebas, yaitu opini audit, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas, yaitu jumlah anggota komite audit, kompetensi komite audit, rapat komite audit, *gender* komite audit dan rangkap jabatan komite audit.

Penelitian Santiani & Muliartha (2018), yang menguji pengaruh independensi, keanggotaan, kompetensi, dan *gender* komite audit terhadap *Audit Delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Alat analisis data yang digunakan adalah

UNMAS DENPASAR

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa keanggotaan komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan independensi, kompetensi, dan *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Persamaan penelitian Santiani & Muliartha (2018), dengan penelitian ini terletak pada variabel independen, yang sama menggunakan variabel keanggotaan, kompetensi dan *gender* sebagai variabel independennya. Persamaan penelitian Santiani & Muliartha (2018), dengan penelitian ini terletak pada objek, yaitu perusahaan manufaktur, dan lokasi penelitian, yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian Santiani & Muliartha (2018), dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, yaitu dalam penelitian Santiani & Muliartha (2018), menggunakan tahun 2014-2016, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru, yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Asmoro (2018), yang menguji pengaruh independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, jumlah anggota komite audit terhadap *audit report lag*, (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan independensi komite audit dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Persamaan penelitian Asmoro (2018), dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan variabel terikat yang sama, yaitu *audit report lag*,

UNMAS DENPASAR

persamaan juga terletak pada variable bebas yang sama, yaitu jumlah rapat komite audit, jumlah anggota komite audit. Perbedaan penelitian Asmoro (2018), dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu dalam penelitian Asmoro (2018), menggunakan perusahaan perbankan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur. Perbedaan juga terletak pada tahun penelitian dalam Asmoro (2018), menggunakan tahun penelitian 2015-2017, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu tahun 2019-2021.

Penelitian Joy (2018), yang menguji tentang pengaruh karakteristik *audit committee financial expertise* (ACexp), *audit committee gender* (ACgen), *auditor quality* (AQ) dan menggunakan variabel kontrol *firm size, leverage* terhadap *audit report lag*. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 185 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 5 tahun yakni 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan model akhir berupa *Generalized Least Square* (GLS) yang diolah dengan menggunakan *software* GRETL. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa *audit committee financial expertise, audit committee gender, dan auditor quality* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Persamaan penelitian Joy (2018), ini menggunakan variabel independen yang sama yaitu *gender* komite audit dan variabel dependen yang sama yaitu *audit report lag*. Serta lokasi penelitian yang sama yaitu di Bursa Efek Indonesia.

UNMAS DENPASAR

Perbedaan penelitian terletak pada tahun penelitian, lokasi penelitian dan alat analisis yang digunakan, pada penelitian Joy (2018), menggunakan tahun penelitian 2015-2019, objek penelitian yaitu perusahaaan pertambangan dan alat analisis regresi yaitu data panel dan model akhir berupa *Generalized Least Square* (GLS), sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2019-2021, objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur, dan alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Penelitian Fakri & Taqwa (2019), yang menguji tentang independensi komite audit, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit dan ukuran komite audit serta variabel terikat adalah *audit report lag* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan independensi komite audit, keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag.* Persamaan penelitian Fakri & Taqwa (2019), dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan persamaan juga terletak pada variabel terikat yang diteliti, yaitu *audit report. Perbedaan penelitian* Fakri & Taqwa (2019), dengan penelitian ini adalah terletak pada tahun penelitian, pada penelitian Fakri & Taqwa (2019), menggunakan tahun penelitian 2015-2017, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2019-2021. Perbedaan penelitian Fakri & Taqwa (2019), dengan

UNMAS DENPASAR

penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu dalam penelitian Fakri & Taqwa (2019), menggunakan perusahaan pertambangan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur.

Penelitian Siahaya *et al.,* (2020), yang menguji menguji pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur tahun 2016 yang diproksikan oleh independensi komite audit, keahlian komite audit, pengalaman komite audit, ukuran komite audit, dan rapat komite audit dan 3 variabel kontrol yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan serta tipe KAP. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit, keahlian komite audit, pengalaman komite audit, ukuran komite audit, dan rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan kewenangan komite audit terbukti tidak berepengaruh. Selain itu, dari ketiga variabel kontrol, profitabilitas menunjukkan pengaruh terhadap *audit report lag*, sedangkan ukuran perusahaan dan tipe KAP tidak menunjukkan adanya pengaruh. Persamaan penelitian Siahaya et al., (2020), dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen yang sama yaitu rapat komite audit dan keahlian komite audit dengan variabel terikat yaitu *audit report lag*. Persamaan penelitian juga dapat dilihat dari objek penelitian yang menggunakan perusahaan manufaktur, serta alat analisis yang sama yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian Siahaya et al., (2020), dengan penelitian ini yaitu pada tahun penelitian dimana menggunakan tahun penelitian 2016, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2019-2021.

UNMAS DENPASAR

Penelitian Kurniawan & Mutmainah (2020), yang menguji pengaruh independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, otoritas komite audit, dan *gender* komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (*audit report lag*) pada perusahaan manufaktur tahun 2016-2018. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan independensi komite audit dan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan keahlian komite audit, otoritas komite audit dan *gender* komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag.* Persamaan penelitian Kurniawan & Mutmainah (2020), dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan terletak pada objek penelitian yang sama, yaitu perusahaan manufaktur. Persamaan juga terletak pada variabel terikat yang diteliti, yaitu *audit report lag.* Perbedaan penelitian Kurniawan & Mutmainah (2020), dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, pada penelitian Kurniawan & Mutmainah (2020), menggunakan tahun 2016-2018, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2019-2021.

Penelitian Wandrianto *et al*., (2021), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, *gender* komite audit dan pertemuan komite audit terhadap *audit report lag* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Alat analisis data yang digunakan yaitu analisi regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa keahlian keuangan komite

audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* sementara *gender* komite audit belum dapat berkontribusi untuk memengaruhi *audit report lag* dalam penelitian ini. Persamaan penelitian Wandrianto *et al*. (2021), dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur serta variabel terikat yang sama, yaitu *audit report lag.* Perbedaan penelitian Wandrianto *et al.* (2021), dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, pada penelitian Wandrianto *et al.* (2021), menggunakan tahun penelitian 2016-2018, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun terbaru yaitu 2019-2021. Perbedaan juga terletak pada variabel bebas yaitu penelitian Wandrianto *et al.* (2021), menggunakan variabel ukuran komite audit, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel jumlah anggota komite audit dan rangkap jabatan komite audit.

UNMAS DENPASAR